



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 3304/188.4.45/Tahun 2024
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kedalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

KETIGA : Rencana Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Wali Kota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar.

- KELIMA : Rencana program dan kegiatan kerja sama daerah yang belum tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan untuk mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan program strategis Nasional dan/atau Daerah dan melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2024
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 3304/188.4.45/Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA
SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029

**DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025-2029**

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI KERJA SAMA	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH				TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
								KSSD	KSDPK	KSDPL	KSDLL		
1	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pemberian layanan rujukan pada Rumah Sakit Bersalin	Jumlah RSB yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar	Meningkatnya akses layanan terhadap ibu hamil	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Perpanjangan KB / PKS
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Bayi baru lahir yang mendapatkan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK)	Meningkatkan akses layanan terhadap bayi baru lahir	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas Yang Dikalibrasi	Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Perpanjangan MoU dengan mitra
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Terakreditasi di Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pelatihan	Meningkatkan mutu dan kompetensi SDM Kesehatan yang terstandar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan mitra
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 (Bantuan Iuran PBPJ PEMDA dan PBPJ Kelas 3 Mandiri Aktif)	Jumlah peserta PBPJ/BP PEMDA dan peserta PBPJ Kelas 3 Mandiri Aktif	Menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Penyediaan anggaran untuk 12 bulan
2	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan Pemda Sekitar terkait Pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya jumlah sambungan rumah yang dilayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Regulasi
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan Pemerintah daerah sekitar terkait penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang dilayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Fasilitasi dengan mitra 2. Regulasi
				Kerja sama dengan pelaku usaha terkait Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang dilayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Fasilitasi dengan mitra 2. Regulasi	
3	Dinas Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah	Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat	Tidak	Ya (CSR)	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra
4	Satpol PP	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketertiban Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatkan Keterampilan Personil Satpol PP dan Satlinmas	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	
5	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kerja sama Dalam Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemadam Kebakaran Dalam Hal Pelaksanaan Pendidikan Baik Sekara Teknis Maupun Non-Teknis	Jumlah Aparatur Pemadam yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Keterampilan Aparatur Pemadam Dalam Hal Teknis Maupun Non-Teknis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra
6	Dinas Sosial	Sosial	Penanganan bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota	Pemberian bantuan dan layanan kedaruratan bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang diberi bantuan dan layanan dalam masa tanggap darurat	Percepatan dalam pemberian bantuan dan layanan terpadu bagi korban bencana dalam masa tanggap darurat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	2025-2029	1. Sarana dan prasarana; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi; 4. Bantuan pendanaan CSR;
			Penanganan bencana	Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan taruna sisa bencana	Peningkatan kapasitas SDM bagi tim Kebencanaan dan TAGANA	Jumlah tim kebencanaan dan TAGANA yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas	Meningkatnya Kompetensi tim kebencanaan dan TAGANA dalam penanganan bencana	Tidak	Ya	Tidak	Ya	2025-2029	1. Pendanaan dan; 2. Fasilitasi dengan mitra;

			Rahabilitasi Sosial	Rahabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian layanan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi bagi Pmerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah pemerlu layanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tentang pentingnya kesehatan gigi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan dan; 2. Fasilitasi dengan mitra;
			Rahabilitasi Sosial	Rahabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas di kota makassar	Database penyandang Disabilitas, Edukasi ke pihak leurahan dan organisasi untuk proses pelaksanaan pendataan, pelatihan kepada penyandang disabilitas potensial untuk kemandirian	Database update penyandang disabilitas, terlaksananya kolaborasi antara pihak kelurahan dan organisasi, terlaksananya pelatihan kepada penyandang disabilitas (Kerja sama dengan disnaker)	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan dan; 2. Fasilitasi dengan mitra;
			Rahabilitasi Sosial	Rahabilitasi sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	pendataan dan pemberian edukasi ke PPKs yang terjaring oleh tim atau stakeholder dinos	database ppks lainnya dan pelatihan kemandirian	database update dan terlaksananya kolaborasi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan dan; 2. Fasilitasi dengan mitra;
			Pemberdayaan Sosial	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Kerja sama pengembangan kompetensi manajemen dan administrasi; 2. Pengembangan UMKM bagi LKSA yang merintis usaha.	jumlah SDM pengurus LKSA yang dilatih dan bersertifikat	Meningkatnya Kompetensi SDM pengurus LKSA	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Penganggaran APBD 2. Lembaga penyediaan pelatihan keterampilan 3. Dukungan anggaran CSR 4. Sarana dan prasarana
			Perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan iuran jaminan Kesehatan	Percepatan dalam pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan dan tepat sasaran	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Penganggaran APBD 2. OPD terkait 3. BPJS Kesehatan 4. Saran dan prasarana
7	Dinas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kerja sama dalam pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi terhadap masyarakat Kota Makassar.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Meningkatnya daya saing/kompetensi tenaga kerja	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi; 4. Bantuan pendanaan CSR.
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama dalam pelaksanaan sertifikasi profesi kepada tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi profesi	Meningkatnya daya saing/kompetensi tenaga kerja	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; dan 2. Fasilitasi dengan mitra.
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama dalam pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Bantuan pendanaan CSR.
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kerja sama dalam pelaksanaan job fair/bursa kerja khusus	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair /bursa kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; dan 2. Fasilitasi dengan mitra.
			Program Hubungan Industrial	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kerja sama dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Perlindungan tenaga kerja rentan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi.
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota "SEKOLAH RAMAH ANAK"	Kerja sama terkait Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Makassar Kerja sama terkait penanganan kasus dan pelanggaran hak anak, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya hak-hak anak Kerja sama pemberian dukungan medis dan psikologis kepada siswa yang membutuhkan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anak-anak.	Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Makassar Jumlah kasus dan pelanggaran hak anak	Meningkatnya Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Makassar Berkurangnya jumlah kasus dan pelanggaran hak anak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Perpanjangan KB/PKS
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota "FORUM ANAK"	Kerja sama pembentukan dan pengembangan forum anak di Kota Makassar	Jumlah forum anak di Kota makassar	Meningkatnya jumlah forum anak di Kota Makassar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Perpanjangan KB/PKS
				Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Kerja sama terkait Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kerja sama terkait layanan kesehatan bagi perempuan dan anak	Jumlah Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Jumlah layanan kesehatan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya Jumlah Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Meningkatnya layanan kesehatan bagi perempuan dan anak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Layanan Kesehatan

			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kab/Kota "Layanan UPT PPA"	Kerja sama penyelenggaraan Layanan terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak	Jumlah layanan korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak	terselenggaranya layanan terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Fasilitasi 2. Perpanjangan PKS
					Kerja sama terkait perlindungan perempuan dan anak dalam proses litigasi maupun non-litigasi di Kota Makassar	Jumlah perlindungan perempuan dan anak dalam proses litigasi maupun non litigasi di Kota Makassar	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dalam proses litigasi maupun non litigasi di Kota Makassar	Tidak	YA	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Perpanjangan PKS 3. Pendampingan advokasi
					Kerja sama terkait pelayanan kerohanian dalam pemenuhan hak perempuan dan anak	Jumlah layanan kerohanian dalam pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan kerohanian dalam pemenuhan hak perempuan dan anak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pelayanan Kerohanian 2. Perpanjangan PKS
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Pemulihan Kesehatan mental AMPK"	Kerja sama penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak dan program rehabilitasi sosial.	Jumlah koordinasi dan implementasi program AMPK, perlindungan anak, dan program rehabilitasi sosial.	Meningkatnya koordinasi dan implementasi program AMPK, perlindungan anak, dan program rehabilitasi sosial.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Rehabilitasi Sosial 2. Fasilitasi Mitra
					Kerja sama penyediaan tenaga ahli (psikolog, psikiater, dan konselor) serta fasilitas kesehatan mental yang dapat diakses oleh anak-anak dibawah perlindungan khusus.	Jumlah tenaga ahli (psikolog, psikiater, dan konselor) serta fasilitas kesehatan mental yang dapat diakses oleh anak-anak di bawah perlindungan khusus.	Tersedianya tenaga ahli (psikolog, psikiater, dan konselor) serta fasilitas kesehatan mental yang dapat diakses oleh anak-anak di bawah perlindungan khusus.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Fasilitasi Kesehatan
			Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota "PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Kerja sama terkait pengambil kebijakan, penyediaan dana, dan pengatur regulasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh PUSPAGA.	Persentase terlaksananya kebijakan, penyediaan dana, dan pengatur regulasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh PUSPAGA.	Terlaksananya kebijakan, penyediaan dana, dan pengatur regulasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh PUSPAGA.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi 3. regulasi
					Kerja sama dengan Tenaga Profesional: psikolog, konselor, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan terkait pemberian layanan di PUSPAGA	Jumlah layanan sosial, Psikososial, dan kesehatan di PUSPAGA	Meningkatnya layanan sosial, Psikososial, dan kesehatan di PUSPAGA	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Bimbingan 2. Konsultasi 3. Layanan Kesehatan
					Kerja sama terkait Pemberian edukasi dan Pelatihan bagi orang tua, guru dan anak-anak	Persentase pelaksanaan edukasi dan Pelatihan bagi orang tua, guru dan anak-anak	Terlaksananya edukasi dan Pelatihan bagi orang tua, guru dan anak-anak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. edukasi 2. Fasilitasi
			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota "IDG (indeks Pemberdayaan Gender & Indeks Pembangunan Gender)"	Kerja sama dalam mendukung kebijakan pembangunan yang sensitif terhadap gender, termasuk dalam hal integrasi IPG dan IPP ke dalam perencanaan pembangunan nasional.	Persentase terlaksananya kebijakan pembangunan yang sensitif terhadap gender, termasuk dalam hal integrasi IPG dan IPP ke dalam perencanaan pembangunan nasional.	Terlaksananya kebijakan pembangunan yang sensitif terhadap gender, termasuk dalam hal integrasi IPG dan IPP ke dalam perencanaan pembangunan nasional.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Regulasi 2. Pendanaan
					Kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendukung pencapaian kesetaraan gender di dunia kerja.	Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendukung pencapaian kesetaraan gender di dunia kerja.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendukung pencapaian kesetaraan gender di dunia kerja.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Peningkatan kapasitas SDM 2. fasilitasi dengan Mitra
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota "Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)"	Kerja sama pemutakhiran data perempuan kepala keluarga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem	Jumlah data perempuan kepala keluarga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.	Tersedianya data perempuan kepala keluarga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Fasilitasi data
					Kerja sama dukungan advokasi maupun dalam memberikan pelatihan serta pembangunan kapasitas bagi perempuan kepala keluarga.	Jumlah dukungan advokasi maupun pelatihan serta pembangunan kapasitas bagi perempuan kepala keluarga.	Tersedianya dukungan advokasi maupun dalam memberikan pelatihan serta pembangunan kapasitas bagi perempuan kepala keluarga.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Dukungan Advokasi 2. Pendanaan
Kerja sama dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan kepala keluarga atau mendukung program pemberdayaan ekonomi melalui investasi atau kemitraan.	Jumlah lapangan pekerjaan bagi perempuan kepala keluarga serta dukungan program pemberdayaan ekonomi melalui investasi atau kemitraan.	Tersedianya lapangan pekerjaan bagi perempuan kepala keluarga serta dukungan program pemberdayaan ekonomi melalui investasi atau kemitraan.			Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Dukungan Fasilitas 2. Lapangan Pekerjaan			

				"Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota "Pematang PUG "	Kerja sama terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik.	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Regulasi 2. PKS
			Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan "Pembentukan Shelter Warga"	Kerja sama terkait implementasi kebijakan, termasuk dalam penyediaan lahan, fasilitas, dan pengelolaan shelter di tingkat lokal.	Persentase pelaksanaan kebijakan, serta kesediaan lahan, fasilitas, dan pengelolaan shelter di tingkat lokal.	Adanya kebijakan, termasuk aset lahan barang milik daerah, dan pengelolaan shelter di tingkat lokal.	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Fasilitasi 2. Pendanaan
9	Dinas Pertanahan	Pertanahan	Penatagunaan Tanah	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Sertipikat tanah	Percepatan penerbitan sertipikat barang milik daerah	Terwujudnya pengamanan aset lahan barang milik daerah	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Dukungan fasilitas lapangan
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan SDM pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan SDM	Meningkatnya sikap kepemimpinan pegawai	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan KB / PKS
10	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium pada Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan (air dan udara)	Kerja sama dengan Laboratorium Lingkungan yang Terakreditasi dan Registrasi KLHK untuk pengujian dan pengambilan sampel uji kualitas lingkungan (air dan udara)	Jumlah Data Kualitas Lingkungan (air dan udara)	Mengetahui Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Kota Makassar sesuai Permenlhk No. 27 Tahun 2021	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan nota kesepaktan sinergi
				Penyusunan kajian pemantauan kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk penelitian dan survey kualitas lingkungan (air laut, air sumur), ekosistem laut dan biota di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Data Kualitas Lingkungan pada wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mengetahui kondisi kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan nota kesepahaman dengan Universitas
				Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab. / Kota	Kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk Penelitian terkait Pengurangan Emisi CO2 di Kota Makassar	Penggunaan Energi Terbarukan	Mengurangi Pengeluaran Biaya Listrik serta Pengurangan Emisi CO2	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan nota kesepahaman dengan Universitas
					Kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk Penelitian dan Survey terkait Reduksi Emisi CO2 di Kota Makassar	Menghitung jumlah reduksi emisi CO2 yang diserap oleh pohon / tanaman yang berada di jalur Green Belt	Mengetahui jumlah serapan Emisi CO2 oleh tanaman / pohon yang berada di jalur Green Belt	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan nota kesepahaman dengan Universitas setiap 2 tahun
				Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait Identifikasi Remediasi unsur Pencemar terhadap dampak lingkungan	Mengukur tingkat Pencemaran melalui analisis Laboratorium	Menggunakan hasil Identifikasi untuk merancang Strategi Pengelolaan dan Mitigasi yang efektif	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan nota kesepahaman dengan Universitas
					Kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait Identifikasi Remediasi terhadap dampak lingkungan	Memberikan informasi mengenai Pemanfaatan Tumbuhan Laut sebagai Pereduksi Bahan Pencemar Organik di Perairan	Menggunakan hasil kajian untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut sebagai agen bioremediasi alami untuk mereduksi bahan pencemar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	Perpanjangan nota kesepahaman dengan Universitas
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Lembaga pelatihan kerja	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan	Meningkatkannya daya saing pelaku usaha	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi; 4. PKS.
					Kerja sama dengan industri besar untuk pengembangan usaha	Jumlah produk UMKM dijual melalui jaringan distribusi industri besar	Meningkatnya skala produksi dan omzet UMKM	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi; 4. PKS.
					Kerja sama dengan lembaga keuangan untuk fasilitas modal usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas modal usaha dari lembaga keuangan	Meningkatnya skala usaha berdampak pada kapasitas produksi, memperluas usaha, dan memenuhi permintaan pasar yang lebih besar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi; 4. PKS
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kerja sama dengan lembaga yang mengeluarkan perizinan untuk fasilitasi perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas perizinan usaha	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan; 2. Fasilitasi dengan mitra; 3. Regulasi; 4. PKS
12	Dinas Perpustakaan	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kerja sama dengan perpustakaan sekolah	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Meningkatnya Jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah angka minat baca	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi 3. regulasi

				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan perpustakaan sekolah yang akan dikembangkan dan diakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang dikembangkan untuk memenuhi standar nasional perpustakaan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi 3. regulasi
13	Dinas Kearsipan	Kearsipan	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kerja sama melibatkan instansi teknis terkait, budayawan dan sejarawan	Jumlah Kerja sama yang akan dilaksanakan dengan instansi, budayawan dan sejarawan	Jumlah arsip sejarah kota makassar yang dilindungi dan diselamatkan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Bimbingan 2. Konsultasi 3. Layanan Kesehatan
14	Dinas Pariwisata	Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kerja sama pelaksanaan event yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Kerja sama yang akan dilaksanakan dengan instansi, asosiasi, pelaku ekonomi kreatif, komunitas ekonomi kreatif	Peningkatan jumlah Kerja sama dengan instansi, asosiasi, pelaku ekonomi kreatif, komunitas ekonomi kreatif	Tidak	Ya	Ya	Ya	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi promosi 3. Konsultansi, bimbingan, pendampingan
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku kreatif yang akan difasilitasi	Meningkatnya jumlah pelaku kreatif yang akan difasilitasi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi promosi 3. Konsultansi, bimbingan, pendampingan
15	Dinas Perikanan dan Pertanian	Perikanan dan Pertanian	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	kerja sama pengembangan kompetensi pembudidaya ikan serta mahasiswa	Jumlah pembudidaya ikan dan mahasiswa yang dilatih	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan dan mahasiswa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Sarana dan prasarana
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	kerja sama pengembangan kompetensi petani serta mahasiswa	Jumlah petani dan mahasiswa yang dilatih	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani serta mahasiswa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Sarana dan prasarana
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	kerja sama pengembangan kompetensi peternak serta mahasiswa	Jumlah peternak serta mahasiswa yang dilatih	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan peternak serta mahasiswa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Sarana dan prasarana
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kerja sama Kecamatan/Kelurahan, SKPD,Volunter dalam Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Informasi daerah Rawan Bencana	Meningkatkan Kapasitas Kawasan Dalam Penanggulangan Bencana	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kerja sama Kecamatan/Kelurahan, SKPD,Volunter dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Simulasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatkan Kapasitas Kawasan Dalam Penanggulangan Bencana	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kerja sama Kecamatan/Kelurahan, SKPD,Volunter , BPBD Kab/Kota Lain, dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Mengurangi Beban/Dampak Bencana bagi Daerah	Ya	Ya	Ya	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra 3. Layanan Kesehatan
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyediaan kepesertaan dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja keagamaan	Jumlah pekerja keagamaan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan	Perlindungan pekerja keagamaan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra
					Pendidikan profesi Guru Agama Islam di Kota Makassar	Jumlah guru agama yang mendapatkan sertifikasi profesi	Meningkatnya jumlah guru agama yang tersertifikasi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra
					Takhassus Tahfidz Al-Qur'an	Jumlah peserta Takhassus yang menjadi Hafidz Al-Qur'an	Meningkatnya kualitas Hafidz Al-Qur'an di Kota Makassar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan 2. Fasilitasi dengan mitra
					Pembinaan muballigh di Kota Makassar	Jumlah Muballigh yang mendapatkan pembinaan	Para Muballigh menyampaikan program pemerintah dalam materi ceramah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2025-2029	1. Pendanaan
18	Bagian Hukum	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum	Litigasi dan Non-Litigasi	Pendampingan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu	Jumlah perkara yang ditangani	Terselesaikannya perkara yang diberikan bantuan hukum	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2025-2029	Fasilitasi dengan mitra

KETERANGAN:

1. KSDD : KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN
2. KSDPK: KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
3. KSDPL: KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMDA LUAR NEGERI
4. KSDL: KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA LUAR NEGERI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Muh. Izhar Kurniawan



WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH.RAMDHAN POMANTO